BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Prasarana jalan merupakan moda transportasi yang berperan penting dalam mendukung pembangunan nasional, regional maupun lokal, dalam melayani mobilitas orang, barang, jasa, distribusi komoditi, perdagangan dan industri seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, politik, keamanan serta sebagai penunjang, pendorong, penggerak pertumbuhan daerah dan pengembangan wilayah dengan mengembangkan sistem jaringan jalan yang terpadu menjangkau seluruh pelosok wilayah Kabupaten Nagan Raya sebagai fungsi Pelayanan Publik. Selain itu jalan juga merupakan bagian dari prasarana dan sarana tranportasi darat yang sampai saat ini masih mendominasi pertumbuhannya dibandingkan dengan transportasi lainnya sehingga perlu mendapat perhatian.

Salah satu elemen dalam menciptakan good governance adalah akuntabilitas. Sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah diharuskan melaksanakan akuntabilitas kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Langkah awal akuntabilitas kinerja adalah penyusunan perencanaan strategis tentang program-program utama yang akan dicapai satu sampai lima tahun ke depan.

Perencanaan strategis adalah proses yang terus menerus dari pembuatan suatu program secara sistematis yang direncanakan secara matang dan terarah dengan suatu keputusan yang bijak tentang masa depan dalam menghadapi otonomi daerah. Pengorganisasian yang sistematis sebagai usaha yang sangat diperlukan untuk melaksanakan keputusan tersebut dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan harapan yang diinginkan dan menuangkan feed back secara sistematis kedalam program utama penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun dengan memperhitungkan kekuatan (*strentgh*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*), dan ancaman (*threath*). Perencanaan strategis ini diharapkan akan menjadi landasan operasional suatu instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mencapai tujuan.

1.2. Tujuan dan Sasaran

Dinas Bina Marga sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, berkewajiban menyusun rencana strategis dalam periode 2013–2017. Dalam rangka menjamin adanya konsistensi dan sinkronisasi dengan dokumen perencanaan pembangunan yang lebih tinggi, penyusunan Renstra Dinas Bina Marga berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Nagan Raya Tahun 2012 – 2017, dengan tetap mendasar pada potensi daerah serta aspirasi yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat.

Maksud dari penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Bina Marga Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013 - 2017 adalah untuk memberikan gambaran dan arah yang jelas dalam pemanfaatan secara optimal sumber daya untuk mencapai tujuan, visi, dan misi yang telah ditetapkan yang selanjutnya dituangkan dalam program-program kerja tahunan yang berkelanjutan guna mencapai sasaran dan tujuan. Substansi renstra ini mencakup indikasi rencana pokok kegiatan yang akan dilakukan dengan sumber dana APBK Nagan Raya dan sumber-sumber lainnya untuk jangka waktu 2013-2017.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Renstra Dinas Bina Marga Kabupaten Nagan Raya disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan acuan atau pedoman bagi Dinas Bina Marga Kabupaten Nagan Raya dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan
2. Menyediakan standar evaluasi kinerja tahunan
3. Menjabarkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah dalam bentuk RPJMD
4. Memudahkan Dinas Bina Marga untuk mencapai tujuan yang diinginkan melalui program dan kegiatan yang akan dilaksanakan secara terukur dan terarah
5. Memudahkan aparatur Dinas Bina Marga Kabupaten Nagan Raya dalam memilih kebijakan program dan kegiatan operasional tahunan untuk lima tahun ke depan

Sasaran penyusunan Renstra Dinas Bina Marga Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013-2017 adalah :

1. Pengalokasian sumber dana yang terbatas pada berbagai kegiatan yang sifatnya strategis untuk pencapaian Visi dan Misi Dinas Bina Marga Kabupaten Nagan Raya yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta visi dan misi yang telah ditetapkan.
3. Pertanggungjawaban dan Pencapaian kinerja (akuntabilitas) dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan anggaran.

1.3. Dasar Hukum

Penyusunan Renstra Dinas Bina Marga Kabupaten Nagan Raya Tahun 2007-2012, didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJM Nasional Tahun 2010-2014;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Nagan Raya.
18. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-dinas dalam Kabupaten Nagan Raya;
19. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Nagan Raya.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Bina Marga Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013-2017 disusun dengan mengacu kepada Lampiran Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

1.2.Tujuan dan Sasaran

1.3.Dasar Hukum

1.4.Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS BINA MARGA

2.1.Tugas Pokok dan Fungsi

2.2.Sumber Daya

2.3.Kinerja Pelayanan

BAB III GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3. Penentuan Isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

4.1.Visi dan Misi

4.2.Tujuan dan Sasaran

4.3. Strategi dan Kebijakan

BAB V PROGRAM DANINDIKASI KEGIATAN

5.1.Rencana Program dan Kegiatan

5.2.Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

BAB VI PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS BINA MARGA KABUPATEN NAGAN RAYA

2.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Bina Marga sebagaimana tersebut dalam Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2008 mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang bina marga serta tugas pembantuan di Kabupaten Nagan Raya.

Untuk menjalankan tugas dimaksud, Dinas Bina Marga mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan pembangunan di bidang bina marga;
b. Perumusan perencanaan teknis operasional pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana jalan dan jembatan;
c. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan prasarana jalan dan jembatan;
d. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, pengembangan, rehabilitasi, peningkatan serta operasional jalan dan jembatan;
e. Pemberian pertimbangan teknis dan rekomendasi ijin penggunaan dan pemanfaatan jalan;
f. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugas dinas dengan instansi terkait dan unsur masyarakat;
g. Pengelolaan ketatausahaan, urusan kepegawaian, keuangan, urusan rumah tangga, perbekalan dan perlengkapan dinas;
h. Pengelolaan dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung tugas dan fungsi di atas, telah ditetapkan Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Nagan Raya yang merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Susunan Organisasi Dinas Bina Marga sesuai dengan Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 11 Tahun 2008, terdiri dari :

a. Kepala Dinas
b. Sekretariat, membawahi:
    1. Sub Bagian Keuangan
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
c. Bidang Jalan, membawahi :
    1. Seksi Pembangunan Jalan
    2. Seksi Pemeliharaan dan Perawatan Jalan
d. Bidang Jembatan, membawahi :
    1. Seksi Pembangunan Jembatan
    2. Seksi Pemeliharaan dan Perawatan Jembatan

e. Bidang Pengujian dan Peralatan, membawahi :

1. Seksi Uji Tahan, Geoteknik dan Uji Bahan Konstruksi
2. Seksi Penataan dan Pemeliharaan Peralatan

f. UPTD;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Dinas Bina Marga Kabupaten Nagan Raya dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Bina Marga
Kabupaten Nagan Raya

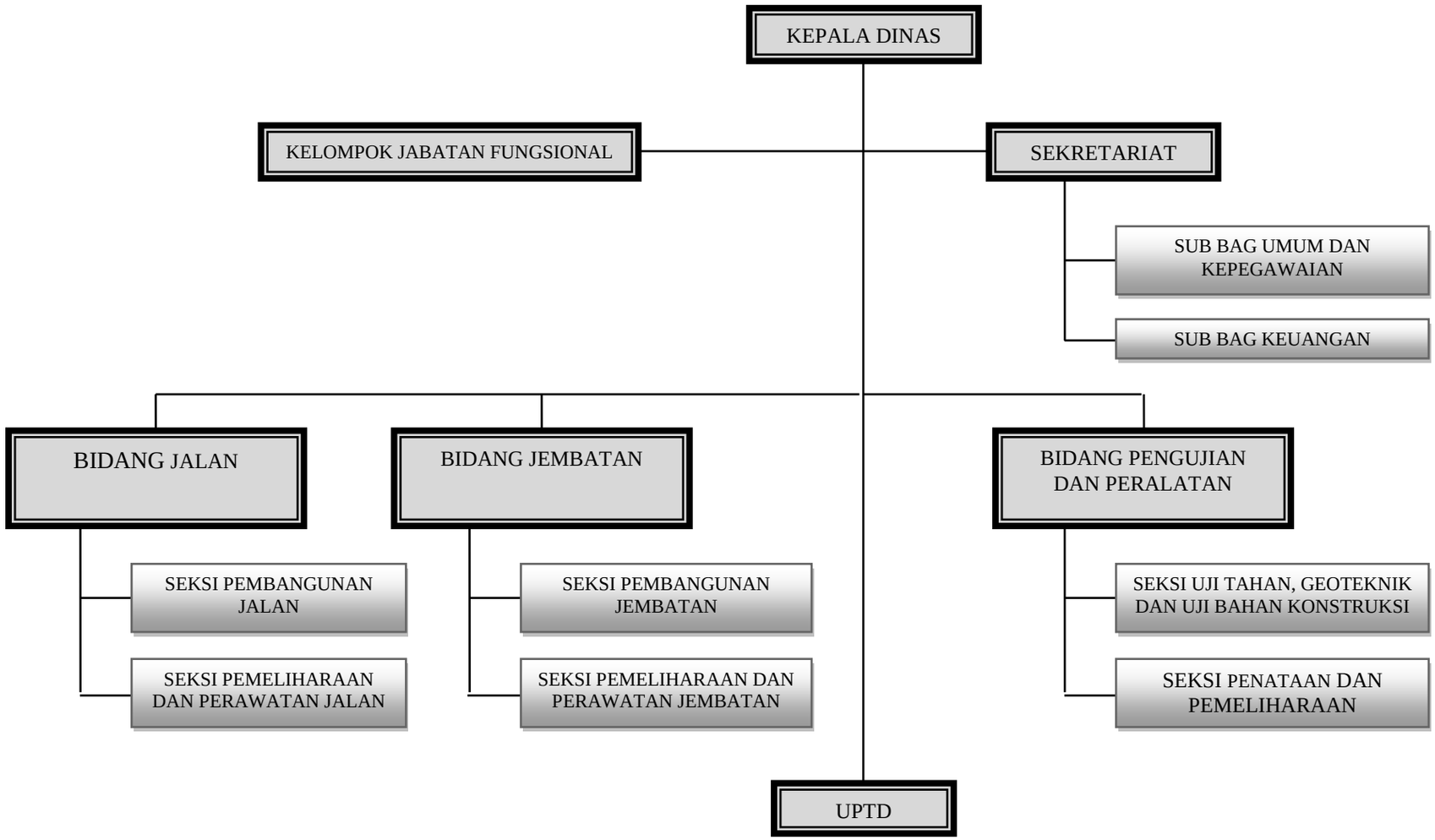

2.2. Sumber Daya

Pemanfaatan sumber daya dan kapasitas sumber daya sangat menentukan suksesnya pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja di Dinas Bina Marga. Sumber daya dalam hal ini adalah aparatur dan sarana serta prasarana yang tersedia.

2.2.1 Sumber daya aparatur

Pegawai Dinas Bina Marga Kabupaten Nagan Raya pada saat ini berjumlah 89 orang terdiri dari 35 orang pegawai negeri sipil dan 54 orang pegawai honorer/kontrak. Kualifikasi pendidikan Pegawai negeri sipil pada saat ini sebesar 2,86% berpendidikan Pascasarjana, 42,86% sarjana dan selebihnya berkualifikasi Diploma (2,86%), SLTA (42,86%) dan SLTP (8,57%). Sedangkan untuk tenaga honorer/kontrak sebesar 81,48% berpendidikan SLTA dan SLTP dan sisanya berpendidikan sarjana (14,81%) dan Diploma III (3,70%). Rincian jumlah PNS dan Non PNS menurut tingkat pendidikan dan golongan dapat dilihat pada Tabel 2.1 - 2.3.

Tabel 2.1 Rincian Pegawai Negeri Sipil Menurut Pendidikan

JENIS PENDIDIKAN	JUMLAH
Strata 2	1 Orang
Strata 1	15 Orang
Diploma III	1 Orang
SLTA	15 Orang
SLTP	3 Orang
JUMLAH	**35 Orang**

Tabel 2.2 Rincian Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan

GOLONGAN	JUMLAH
IV	1 Orang
III	15 Orang
II	16 Orang
I	3 Orang
JUMLAH	**35 Orang**

Tabel 2.3 Rincian Pegawai Honorer/Kontrak Menurut Pendidikan

JENIS PENDIDIKAN	JUMLAH
Strata 1	8 Orang
Diploma	2 Orang
SLTA	35 Orang
SLTP	9 Orang
JUMLAH	**54 Orang**

2.2.2. Sarana dan prasarana

Ketersediaan barang-barang inventaris Dinas Bina Marga Kabupaten Nagan Raya merupakan salah satu penunjang dalam menjaga kesinambungan dan kelancaran kegiatan di Dinas Bina Marga Kabupaten Nagan Raya. Pengadaan barang inventaris dan peralatan kantor pada umumnya bersumber dari dana APBK Kabupaten Nagan Raya. Berikut ini tabulasi kondisi perlengkapan kantor di Dinas Bina Marga Kabupaten Nagan Raya.

Tabel 2.4 Rincian Perlengkapan

NO	URAIAN	UNIT	KET
1	Bangunan Gedung		
	Kantor dan Tanah	1 Unit	2003/2004
	Gedung Workshop dan Tanah	1 Unit	2006
2	Alat Angkutan		
	- Kenderaan Roda 4	2 Unit	2006, 2014
	- Kenderaan Roda 2	16 Unit	2004-2008
	- Mobil Pemadam	1 Unit	2003
	- Mobil PAM	2 Unit	2003
	- Tronton	1 Unit	2003
	- Dump truck	3 Unit	2004
3	Alat Berat		
	- Mesin Gilas	2 Unit	2003,2004
	- Motor Grader	2 Unit	2003
	- Excavator/ backhoe	3 Unit	2004, 2005
4	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1 Paket	2004-2013
5	Alat Studio		
	- Kamera Digital	2 Unit	2004
	- Sound System (wireless)	1 Unit	2005
	- GPS	1 Unit	2012
6	Komputer PC	7 Unit	2004-2013
7	Laptop	9 Unit	2004-2009
8	Mesin ketik	3 Unit	2003-2011
9	Meja Kerja dan Kursi Kerja	40 Set	2003-2013
10	Meja dan Kursi Rapat	2 set	2005-2013
11	Meja dan Kursi Tamu	2 set	2004-2013

Sumber : Data Inventaris Barang Dinas Bina Marga Tahun 2013

2.3. Kinerja Pelayanan

2.3.1. Kinerja pelayanan tahun sebelumnya

Sesuai dengan kemampuan daerah dalam penyediaan dana untuk infrastruktur sangat terbatas, maka kemampuan Dinas Bina Marga dalam melaksanakan tugas pokok dan tupoksinya juga sangat terbatas. Perkembangan Kabupaten Nagan Raya yang semakin pesat menyebabkan akses transportasi menjadi semakin penting untuk diperhatikan. Peningkatan dan pengembangan jaringan jalan belum sebanding dengan pesatnya pertumbuhan terutama di sektor ekonomi karena baiknya kondisi jalan dan jembatan dan lancarnya akses tranportasi sangat mempengaruhi biaya produksi.

Di dalam RPJM Kabupaten Nagan Raya 2012-2017, setiap tahun rencana pencapaian target peningkatan dan pembangunan ruas jalan kabupaten adalah sebesar 10% namun kenyataannya sesuai dengan anggaran yang tersedia hanya tercapai sekitar 6% atau lebih kurang 15 Km dari total target seluruhnya 285 Km hingga tahun 2017. Hal tersebut belum termasuk total panjang jalan desa yang sifatnya strategis dan masih bisa diusulkan peningkatan statusnya menjadi ruas jalan kabupaten.

2.3.2. Kondisi yang diinginkan dan proyeksi ke depan

Dinas Bina Marga Kabupaten Nagan Raya dituntut untuk mempunyai rencana strategis yang merupakan serangkaian program dan kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul.

Berdasarkan kondisi existing, maka untuk mencapai target sesuai dengan RPJM Kabupaten Nagan Raya 2012-2017 maka tersedianya anggaran yang memadai dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur merupakan dua hal yang penting diperhatikan. Dengan anggaran yang terbatas dari sumber dana APBK Nagan Raya, maka diperlukan strategi untuk memperoleh anggaran dari sumber dana lainnya seperti dari provinsi, pusat maupun dari lembaga-lembaga donor. Untuk mencapai target sesuai dengan RPJM maka setidaknya dibutuhkan anggaran yang lebih besar.

Selain tersedianya anggaran yang memadai dan kapasitas aparatur yang baik, permasalahan kualitas konstruksi menjadi suatu hal yang juga penting. Untuk itu pengembangan dan peningkatan sarana gedung workshop dan pengadaan laboratorium konstruksi harus segera diwujudkan. Gedung workshop yang telah dibangun belum berfungsi secara maksimal dikarenakan masih minimnya aparatur yang terlatih dan sarana yang belum memadai.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarakan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Sistem jaringan jalan Kabupaten pada beberapa koridor lintas belum sinergis, sehingga memberikan kendala pada sarana transportasi yang dipergunakan. Harus diakui bahwa belum tersinerginya Jalan Nasional dan Jalan Provinsi dikarenakan adanya pemisahan tegas yang tertera dalam Undang-Undang No.38/2004 tentang Jalan yang berdasarkan pemikiran desentralisasi bidang jalan. Padahal, pada kenyataan di lapangan, seluruh jalan merupakan bagian dari sektor transportasi, jika Jalan Nasional atau Provinsi saja yang mantap sementara jalan Kabupaten tidak mantap, akhirnya biaya transportasi tetap tinggi karena ada bagian dari jalan yang rusak kondisinya.

Dalam wilayah Kabupaten Nagan Raya masih terdapat jalan dan jembatan yang kondisinya belum memenuhi standar teknis pelayanan minimal di antaranya :

1. Kapasitas jalan dan jembatan yang belum memenuhi standar teknis pelayanan minimal yaitu :
   a. Lebar jalan yang kurang dari 6.00 m
   b. Lebar jembatan yang kurang dari 9.00 m
2. Kualitas jalan dan jembatan yang belum memenuhi standar teknis pelayanan minimal yaitu :
   a. Struktur jalan yang belum memenuhi beban standar jalan kolektor sekunder (MST 8 Ton)
   b. Struktur jembatan yang belum memenuhi beban standar Ditjen Bina Marga
3. Daerah - daerah tertentu yang berpotensi rawan longsor/ banjir yaitu :
   a. Daerah dengan struktur asli yang labil;
   b. Daerah perbukitan yang rawan terjadinya longsor;
   c. Daerah genangan banjir.

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dinas Bina Marga Kabupaten Nagan Raya merupakan salah satu pelaku pembangunan yang diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nagan Raya. Misi kepala daerah yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Bina Marga Kabupaten Nagan Raya adalah pada misi ke-5 dan ke-10 dan sepuluh misi yaitu sebagai berikut :

1. Mewujudkan sektor agribisnis sebagai *leading sector* dalam mendorong percepatan ekonomi rakyat.
2. Mewujudkan zona pembangunan di setiap kecamatan berdasarkan potensi, keunikan, dan karakteristik wilayah.

Meskipun dalam dua misi tersebut tidak tersurat jelas dalam hal pengembangan infrastruktur namun pembangunan infrastruktur mempunyai fungsi dalam peningkatan

ekonomi masyarakat. Infrastruktur erat kaitannya dengan sarana dan prasarana pendukung produksi baik dalam masa produksi maupun distribusi. Buruknya infrastruktur menyebabkan besarnya biaya produksi sehingga kalah bersaing dalam pasar.

Seiring dengan harapan tersebut, Dinas Bina Marga Kabupaten Nagan Raya dituntut untuk mampu mengejawantahkan Visi Pembangunan Kabupaten Nagan Raya 2012-2017, melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Bina Marga sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-dinas dalam Kabupaten Nagan Raya.

Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas merupakan salah satu faktor penentu daya tarik suatu kawasan/wilayah, di samping faktor kualitas lingkungan hidup, image, dan masyarakat (budaya). Sementara itu, kinerja infrastruktur merupakan faktor kunci dalam menentukan daya saing global, selain kinerja ekonomi makro, efisiensi pemerintah, dan efisiensi usaha. Dalam hal daya saing global tersebut.

3.3. Penentuan Isu-isu Strategis

Ukuran keberhasilan yang akan dicapai Dinas Bina Marga Kabupaten Nagan Raya pada periode 2013-2017 adalah terwujudnya peningkatan pembangunan infrastruktur untuk menghantarkan pertumbuhan ekonomi menuju masyarakat Kabupaten Nagan Raya yang sejahtera, tentunya juga dilandasi oleh ‘Isu Strategis’ sebagai fokus pembangunan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya di masa mendatang, serta upaya peningkatan pelayanan yang berkualitas dan peningkatan keselamatan dalam bidang ke binamargaan kepada masyarakat.

Berangkat dari identifikasi permasalahan yang dihadapi dan meningkatnya dinamika kehiduoan social, ekonomi, budaya dan politik masyarakat serta pengembangan wilayah di Kabupaten Nagan Raya, membuat semakin tinggi dan dan vitalnya peran infrastruktur sebagai sarana publik untuk dapat semakin mengimbangi tuntutan masyarakat. Selain itu, infrastruktur juga terkait erat dengan koneksitas regional dan nasional, yang mendukung penguatan posisi Kabupaten Nagan Raya secara regional dan nasional. Maka dirumuskan isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Nagan Raya melalui berbagai pertimbangan di antaranya memiliki pengaruh besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berukut :

1) Tingginya laju pertumbuhan dan pesatnya kegiatan sosial ekonomi serta masih adanya kesenjangan atar wilayah, memerlukan pengembangan infrastruktur secara terpadu, integral dan lintas sektor.
2) Belum optimalnya kondisi infrastruktur di Kabupaten Nagan Raya dalam mengimbangi dinamika kebutuhan dan tuntutan masyarakat serta wilayah, baik di lingkup regional dan nasional.

3) Adanya kesenjangan antar wilayah terutama antara koridor jalan nasional dan koridor jalan provinsi yang memerlukan pembenahan infrastruktur secara massif.
4) Masih adanya daerah - daerah tertentu yang berpotensi rawan longsor/ banjir dan tanah dasar labil yang berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi sehingga memerlukan penanganan infrastruktur yang inofatif.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi

Dalam rangka mencapai visi dan misi dari suatu organisasi maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional, berupa tujuan dan sasaran organisasi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, merupakan hasil akhir yang hendak dicapai dalam jangka waktu 1 sampai dengan 5 tahun. Tujuan organisasi harus sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.

4.1.1. Visi

Visi adalah gambaran yang ingin diwujudkan di masa mendatang oleh suatu organisasi. Visi yang tepat bagi masa depan suatu instansi pemerintah akan mampu menjadi akselerator kegiatan instansi tersebut, termasuk perancangan rencana strategis secara keseluruhan, pengelolaan sumber daya, pengembangan indikator kerja, cara pengukuran dan evaluasi kinerja yang akan diintegrasikan menjadi sinergi yang diperlukan oleh instansi tersebut.

Penetapan visi Dinas Bina Marga Kabupaten Nagan Raya berpijak pada visi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan diangkat dari fenomena otonomi daerah yang berbasis pada keunggulan kompetitif lokal, namun memiliki peluang dan mampu menghadapi tantangan, baik yang berskala regional maupun global serta dipengaruhi oleh isu strategis yang berkembang, di antaranya masalah kemiskinan, kesenjangan daerah, pengangguran, pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, pelayanan publik dan lain-lain.

Berpijak pada beberapa pertimbangan tersebut diatas, maka Dinas Bina Marga menetapkan visi, yaitu : **”*Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang Mantap dalam Rangka Mendukung Kemandirian Pemerintah dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Nagan Raya*”.**

Visi di atas memberikan pengertian sebagai berikut :

1. Tersedianya infrastruktur jalan dan jembatan yang handal dan terintegrasi untuk mendukung pembangunan ekonomi, sosial dan budaya dalam mencapai kemandirian wilayah.
2. Terwujudnya akses pelayanan transportasi hingga ke kawasan pusat-pusat pertumbuhan dan daerah terisolir dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kesenjangan wilayah sehingga tercapainya kesejahteraan masyarakat.

4.1.2. Misi

Misi merupakan sesuatu yang harus dilakukan agar tujuan organisasi dapat terlaksanakan dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Di samping

itu juga diharapkan dapat menunjukkan peran dan program-program pemerintah kepada seluruh dan jajaran organisasi serta pihak-pihak yang berkepentingan.

Dengan mengacu pada visi sebagaimana tersebut di atas, maka misi yang hendak dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga Kabupaten Nagan Raya adalah :

1. Mewujudkan sarana dan prasarana bidang jalan dan jembatan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
2. Meningkatkan aksesibilitas wilayah yang sedang dan belum berkembang di wilayah Kabupaten Nagan Raya

Misi tersebut ditetapkan dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Dinas Bina Marga Kabupaten Nagan Raya serta tetap berdasarkan pada siklus manajemen Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, baik pada tahapan pra-kegiatan, in-kegiatan, maupun pascakegiatan, yang kesemuanya dilakukan secara konsisten dan terpadu.

4.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan organisasi akan mempertajam fokus pelaksanaan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan aktivitas lembaga dalam arah semua program dan melaksanakan misinya, oleh karena itu sekaligus dapat dijadikan dasar untuk menetapkan indikator kinerja.

Sejalan dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Dinas Bina Marga Kabupaten Nagan Raya serta visi Dinas Bina Marga yang telah ditetapkan, maka tujuan yang ditetapkan adalah :

1. Meningkatkan pembangunan jalan dan jembatan yang mengacu pada arah pembangunan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Nagan Raya;
2. Mengupayakan tersedianya sumber daya fisik sarana dan prasarana guna mendukung pelaksanaan pembangunan yang berkembang;
3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Bina Marga Kabupaten Nagan Raya selaku instansi pemerintah;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparat agar memiliki komitmen dan kinerja yang tinggi serta potensial;
5. Meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Dinas Bina Marga Kabupaten Nagan Raya dengan instansi terkait dan unsur masyarakat;
6. Meningkatkan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan tugas-tugas Dinas Bina Marga Kabupaten Nagan Raya; dan
7. Meningkatkan validitas data hasil evaluasi kegiatan Dinas Bina Marga.

Sasaran adalah penjabaran tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, tribulanan atau bulanan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat

spesifik, terinci, dapat diukur dan dicapai. Berpijak pada tujuan tersebut di atas, maka sasaran utama yang ditetapkan oleh Dinas Bina Marga Kabupaten Nagan Raya adalah :

1. Terlaksananya pembangunan prasarana jalan dan jembatan yang dapat mengakomodasi kebutuhan prasarana lalu lintas orang dan barang yang memadai;
2. Terlaksananya pembinaan kepada masyarakat mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pengelolaan/pemeliharaan pembangunan jalan dan jembatan, baik secara langsung maupun tidak langsung;
3. Meningkatnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam hal rekomendasi terkait dengan perijinan;
4. Terwujudnya perencanaan dan pengawasan teknis pembangunan jalan dan jembatan yang sesuai dengan kebutuhan;
5. Terwujudnya pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan yang memenuhi persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Terwujudnya koordinasi yang baik dengan pihak-pihak terkait.
7. Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Dinas Bina Marga Kabupaten Nagan Raya.
8. Meningkatnya pengetahuan, pemahaman dan pengalaman seluruh jajaran Dinas Bina Marga Kabupaten Nagan Raya.
9. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang kelancaran tugas Dinas Bina Marga Kabupaten Nagan Raya.

4.3. Strategi dan Kebijakan

Strategi merupakan terjemahan pemikiran kepada tindakan yang diarahkan pada penyelenggaraan operasional sehari-hari dari seluruh komponen dan unsur organisasi. Untuk menetapkan strategi dibutuhkan analisis-analisis untuk melihat dan mempertimbangkan beberapa hal seperti potensi dan peluang serta hambatan dan ancaman. Metode analisis yang digunakan adalah SWOT, sebuah metode yang sudah umum dilakukan.

- Kekuatan *(strenght)*
  a. Komitmen pimpinan beserta seluruh staf terhadap kegiatan pembangunan yang mempunyai arti penting bagi pembuatan kebijakan publik di Kabupaten Nagan Raya.
  b. Jumlah dan kualifikasi SDM Dinas Bina Marga Kabupaten Nagan Raya.
  c. Semangat kebersamaan dalam melaksanakan setiap kegiatan instansi.
  d. Jalinan hubungan yang baik dengan lembaga-lembaga Pemerintah maupun Perguruan Tinggi Negeri/Swasta dan lembaga-lembaga Pemerintah Daerah.

- Kelemahan
  a. Masih terbatasnya SDM yang mempunyai kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan bidang tugasnya.
  b. Disiplin keilmuan SDM yang ada banyak yang kurang sesuai dengan misi instansi.

c. Relatif terbatasnya dana pemeliharaan jaringan jalan dan jembatan yang dimiliki.
d. Keadaan jalan dan jembatan sudah terlalu lama penggunaannya.

- Peluang
  a. Komitmen yang baik dari Kepala Daerah terhadap kegiatan pembangunan
  b. Dukungan dana APBK Nagan Raya (walaupun masih sangat terbatas)
  c. Tawaran kerjasama dengan pihak lain sehingga memudahkan dan memperlancar kegiatan pembangunan
  d. Koordinasi pada sistem Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya yang cukup baik
- Ancaman
  a. Rendahnya pertumbuhan ekonomi
  b. Meningkatnya angka kemiskinan
  c. Rendahnya kondisi dan kualitas pelayanan, khususnya di bidang infrastruktur
  d. Terbatasnya lapangan kerja yang tersedia
  e. Menurunnya pengendalian dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Berdasarkan analisis SWOT di atas, strategi yang ditetapkan adalah :

a. Menyediakan dukungan dana yang memadai, yang dapat mendukung serta mengakomodir tuntutan masyarakat akan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan;
b. Menyediakan sumber daya manusia yang profesional, yang mampu memahami serta melaksanakan program/kegiatan yang telah ditetapkan sehingga kualitas pelayanan semakin baik;
c. Menyediakan sarana dan prasarana penunjang kegiatan yang memadai, yang mampu mendukung terlaksananya kegiatan secara baik, aman dan lancar;
d. Menjaga situasi dan kondisi yang aman dan kondusif, sehingga program/kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Kebijakan program operasional dan kegiatan atau aktivitas organisasi mengacu kepada visi, misi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu.

Arah kebijakan pembangunan yang akan dicapai oleh Dinas Bina Marga Kabupaten Nagan Raya, dengan berpedoman pada faktor kunci keberhasilan dalam perencanaan strategis yang telah disusun untuk jangka waktu lima tahun (2013-2017):

1. Meningkatkan pembangunan di bidang sarana dan prasarana sesuai dengan sektor yang dikembangkan yang mengacu pada arah pembangunan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Nagan Raya.
2. Meningkatkan akuntabilitas Dinas Bina Marga Kabupaten Nagan Raya selaku instansi pemerintah.
3. Meningkatkan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Bina Marga Kabupaten Nagan Raya selaku aparatur pemerintah, sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

4. Meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Dinas Bina Marga Kabupaten Nagan Raya dengan instansi terkait dan unsur masyarakat.
5. Meningkatkan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan tugas-tugas Dinas Bina Marga Kabupaten Nagan Raya.

TABEL 4. 1. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2013 – 2017 DINAS BINA MARGA KABUPATEN NAGAN RAYA

Rumusan Visi : Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang Mantap dalam Rangka Mendukung Kemandirian Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Nagan Raya

Rumusan Misi :
1. Mewujudkan sarana dan prasarana bidang jalan dan jembatan yang mendukung pembangunan ekonomi, sosial dan budaya
2. Meningkatkan aksesibilitas wilayah yang sedang dan belum berkembang di wilayah Kabupaten Nagan Raya

No.	Tujuan	Sasaran		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		Ket.
	Uraian	Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	
1	2	3	4	5	6	7
1	Memperlancar arus lalu lintas barang dan jasa	Kondisi jalan/ jembatan menjadi mantap	Output: Terbangunnya jalan dan jembatan Outcome : Meningkatnya aksesibilitas transportasi	Pembangunan jalan dan jembatan di Kab.Nagan Raya	Pembangunan jalan dan jembatan	
2	Memperbaiki jalan yang sebelumnya dalam kondisi rusak	Arus lalu lintas menjadi lebih lancar	Output : Terlaksananya rehabilitasi jalan dan jembatan	Perbaikan jalan yang rusak di Kabupaten Nagan Raya	Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan jembatan	

No.	Tujuan	Sasaran		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		Ket.
	Uraian	Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	
1	2	3	4	5	6	7
			Outcome : Kondisi jalan dan jembatan menjadi baik dan aman dilewati			
3	Memperlancar pelayanan pelaksanaan kebinamargaan	Berfungsinya Alat-alat Berat	Output : Terlaksanya Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat-alat Berat Outcome : Meningkatnya pelayanan pelaksanaan kebinamargaan	Terpeliharanya peralatan berat	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	

No.	Tujuan	Sasaran		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		Ket.
	Uraian	Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	
1	2	3	4	5	6	7
4	Memperlancar arus lalu lintas di wilayah pedesaan	Terlaksananya pembangunan ruas jalan dengan lapis permukaan aspal dan makadam	Output : Terlaksananya infrastruktur pedesaan Outcome : Meningkatnya produktivitas ekonomi	Terlaksananya pembangunan jalan pedesaan di Kabupaten Nagan Raya	Pembangunan infrastruktur pedesaan	
5	Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah	Memperlancar kegiatan adminstrasi perkantoran	Output : Tersedianya jasa pelayanan adminstrasi perkantoran Outcome : Meningkatnya kinerja aparatur adminstrasi perkantoran	Penyediaan jasa pelayanan adminstrasi perkantoran	Pelayanan adminstrasi perkantoran	

No.	Tujuan	Sasaran		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		Ket.
	Uraian	Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	
1	2	3	4	5	6	7
6	Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah	Memperlancar kegiatan adminstrasi dan teknis perkantoran	Output : Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Outcome : Meningkatnya kinerja aparatur perkantoran	Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran	Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	
7	Memelihara sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	Output : Terlaksananya perawatan/pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur Outcome : Sarana dan prasarana aparatur berfungsi baik	Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	

No.	Tujuan	Sasaran		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		Ket.
	Uraian	Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	
1	2	3	4	5	6	7
8	Meningkatkan kinerja aparatur	Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur	Output : Tersedianya aparatur yang berkualitas Outcome : Kinerja aparatur menjadi lebih baik	Pembinaan, pendidikan dan pelatihan	Peningkatan Kapasitas SDM	
9	Menyusun dokumen Sistem Pelaporan Capaian Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan pencapaian kinerja SKPD	Output : Tersusunnya dokumen Sistem Pelaporan Capaian Kinerja SKPD Outcome : Meningkatnya kinerja aparatur dan pengelolaan anggaran SKPD	Monitoring dan evaluasi	Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	

BAB V
PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN

5.1. Rencana Program dan Kegiatan

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga Kabupaten Nagan Raya untuk mencapai tujuan, dan sasaran yang ditetapkan untuk masa 5 (lima) tahun ke depan.

Dinas Bina Marga Kabupaten Nagan Raya menyusun program dan kegiatan dengan memperhatikan rancangan Renstra yang diintegrasikan dengan visi, misi, kebijakan dan program yang tertuang dalam RPJM Kabupaten Nagan Raya, serta meninjau kegiatan yang telah disusun dalam tahun 2013.

Adapun program dan kegiatan sesuai kewenangan Dinas Bina Marga adalah:

A. Program/Kegiatan pada Dinas Bina Marga :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
   - 1.1. Penyediaan jasa surat menyurat
   - 1.2. Penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik
   - 1.3. Penyediaan jasa kebersihan kantor
   - 1.4. Penyediaan alat tulis kantor
   - 1.5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
   - 1.6. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
   - 1.7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
   - 1.8. Penyediaan makanan dan minuman
   - 1.9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
   - 1.10. Penyediaan jasa pelelangan/pengadaan barang
   - 1.11. Penyediaan tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
   - 2.1. Pengadaan peralatan gedung kantor
   - 2.2. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
   - 2.3. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
   - 2.4. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
   - 2.5. Rehabilitasi sedang/ berat rumah gedung kantor
3. Peningkatan Disiplin Aparatur
   - 3.1. Pengadaan mesin/ kartu absensi
   - 3.2. Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
   - 4.1. Bintek teknis implementasi peraturan perundang-undangan
   - 4.2. Pendidikan dan pelatihan formal

5. Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
   - 5.1 Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   - 5.2 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
   - 5.3 Penyusunan Renja/RKA, DPA dan DPPA Dinas Bina Marga

B. Program/Kegiatan Urusan Wajib :

1. Pembangunan Jalan dan Jembatan
   - 1.1. Perencanaan jalan dan jembatan
   - 1.2. Pembangunan jalan
   - 1.3. Pembangunan jembatan
   - 1.4. Monitoring dan evaluasi
2. Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
   - 2.1. Perencanaan turap/talud/bronjong
   - 2.2. Pembangunan turap jalan
   - 2.3. Pembangunan talud jalan
   - 2.4. Pembangunan bronjong pengaman abutment jembatan
   - 2.5. Monitoring dan evaluasi
3. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
   - 3.1. Perencanaan rehabilitasi jalan dan jembatan
   - 3.2. Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan
   - 3.3. Rehabilitasi/ pemeliharaan jembatan
   - 3.4. Monitoring dan evaluasi
4. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Talud/Bronjong
   - 4.1. Perencanaan rehabilitasi talud/bronjong
   - 4.2. Rehabilitasi/ pemeliharaan talud
   - 4.3. Rehabilitasi/ pemeliharaan bronjong
   - 4.4. Monitoring dan evaluasi
5. Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
   - 5.1. Inspeksi kondisi jalan
   - 5.2. Inspeksi kondisi jembatan
   - 5.3. Evaluasi dan pelaporan
6. Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan
   - 6.1. Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat
   - 6.2. Rehabilitasi jembatan dalam kondisi tanggap darurat
   - 6.3. Monitoring dan evaluasi
7. Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan
   - 7.1 Penyusunan sistem informasi/data base jalan
   - 7.2 Penyusunan sistem informasi/data base jembatan

7.3 Monitoring dan evaluasi

8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

8.1 Pembangunan gedung balai latihan kebinamargaan

8.2 Pembangunan gedung workshop

8.3 Pembangunan laboratorium kebinamargaan

8.4 Pengadaan alat-alat berat

8.5 Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat

8.6 Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan

8.7 Rehabilitasi/pemeliharaan gedung balai latihan kebinamargaan

8.8 Rehabilitasi/pemeliharaan gedung workshop

8.9 Rehabilitasi/pemeliharaan laboratorium kebinamargaan

8.10 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat

8.11 Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat

8.12 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan

8.13 Pengadaan tanah untuk pembangunan jalan dan jembatan

8.14 Monitoring dan evaluasi

5.2. Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Untuk mencapai visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan mengacu tujuan dan sasaran RPJMD sebagai perwujudan realisasi capaian Renstra 2013-2017 dilaksanakan melalui program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

BAB VI
PENUTUP

Rencana Strategis ini adalah pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Bina Marga Kabupaten Nagan Raya serta dijadikan acuan dalam evaluasi dan laporan pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan. Keterpaduan arah dalam mencapai Visi dan Misi Kabupaten Nagan Raya dan target-target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nagan Raya lima tahun ke depan akan dikoordinasikan lebih lanjut oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Dokumen ini memiliki jangka waktu tahun 2013-2017 sesuai dengan masa kerja Bupati-Wakil Bupati dan sesuai pula dengan jangka waktu RPJMD Kabupaten Nagan Raya 2013-2017. Rencana Strategis ini bersifat dinamis sehingga dalam perjalanannya dapat dilakukan review, dan apabila terjadi perubahan-perubahan yang signifikan terkait dengan kebijakan pemerintah maupun terjadi perubahan atas kondisi lingkungan strategis, maka dokumen ini dapat dilakukan peninjauan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dokumen ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya kondisi jaringan jalan yang memadai dalam rangka memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah, perekat antar daerah/ wilayah perbatasan kabupaten, menumbuhkembangkan kegiatan ekonomi sebagai sektor utama dalam pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nagan Raya serta menciptakan iklim investasi wilayah serta memperluas akses pelayanan sosial dasar maupun pelayanan administrasi publik lainnya dalam mendukung daya saing.

Plt. KEPALA DINAS BINA MARGA
KABUPATEN NAGAN RAYA
dto
H. IR. ARDIMARTHA
Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip. 19651018 199603 1 003